

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Pelestarian Budaya Kesenian Betawi di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan Jakarta Selatan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Adapun indikator-indikator yang ada dalam komunikasi, yaitu:

- a. Pada indikator transmisi, pelaksanaan kebijakan Pelestarian Budaya Kesenian Betawi dalam pemberian informasi sudah dilakukan berupa rapat mingguan dan bulanan mengenai pelaksanaan Pelestarian Budaya kesenian Betawi di Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta.
- b. Pada indikator kejelasan, pelaksanaan Pelestarian Budaya Kesenian Betawi di Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta pemberian informasi sudah berjalan baik, yaitu memberikan informasi yang lengkap dan jelas tentang setiap kegiatan atau acara yang dipromosikan, termasuk tanggal, waktu, lokasi, dan cara untuk berpartisipasi atau mendapatkan informasi lebih lanjut.
- c. Pada indikator konsisten, pelaksanaan Pelestarian Budaya Kesenian Betawi Penyampaian informasi yang disampaikan masih adanya ketidakkonsistenan dalam penyampaian informasi, selain itu kurangnya pemahaman akan informasi dan tujuan.

2. Sumber Daya

Adapun indikator-indikator yang ada, sebagai berikut:

- a. Pada indikator Sumber Daya Manusia (*staff*), pelaksanaan Pelestarian Budaya Kesenian Betawi di Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta ini masih ada beberapa pegawai Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Selatan dan Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi yang merupakan sebagai pelaksana kebijakan belum terpenuhi. Sedangkan dalam hal ini diperlukan pelaksana kebijakan yang memadai dalam proses implementasi kebijakan Pelestarian Budaya Kesenian Betawi.
- b. Pada indikator Sumber Daya Non Manusia (sarana prasarana), dalam implementasi Pelestarian Budaya Kesenian Betawi di Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. Belum terpenuhi dengan baik. Karena masih minimnya fasilitas dan finansial yang diperlukan dalam melaksanakan pelestarian budaya kesenian Betawi.

3. Disposisi

Dalam implementasi pelestarian Budaya Kesenian Betawi di Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta pada Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Selatan dan Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi (UPK-PBB) cukup baik. Pelaksanaan kebijakan dalam hal ini selalu siap dan bertanggung jawab untuk melaksanakan Pelestarian Budaya Kesenian Betawi di Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta seperti yang diharapkan sesuai dengan intruksi dari pusat. Sikap pelaksana kegiatan dituntut dapat bekerjasama secara baik antara instansi terkait, hal ini dikarenakan untuk sistem yang telah ada dapat

berjalan dengan sistematis atau sesuai dengan aturan Pelestarian Budaya Kesenian Betawi di Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta.

4. Struktur Birokrasi

Pada indikator ini di dalam Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Selatan belum adanya prosedur-prosedur dasar pelaksanaan, prosedur-prosedur dasar kerja atau *Standar Operating Procedure* (SOP), namun dalam begitu pelaksanaan kebijakan Pelestarian Budaya Kesenian Betawi tetap berjalan dengan semestinya.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Selatan diperlukan perbaikan dalam hal komunikasi, khususnya terkait dengan konsistensi penyampaian informasi selain itu perlu dibuatnya Standar Operasional Prosedur (SOP), yang dapat membantu memastikan bahwa setiap tugas atau prosedur dijalankan secara konsisten, efisien, dan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.
2. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu meningkatkan sumber daya yang masih minim di UPK-PBB dengan penyediaan anggaran tambahan, pengembangan program pelatihan, kerjasama dengan pihak eksternal, dan peningkatan fasilitas dan infrastruktur.